

**PENGARUH SYIAH IMAMIYAH TERHADAP
KEBIJAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI
REPUBLIK ISLAM IRAN**

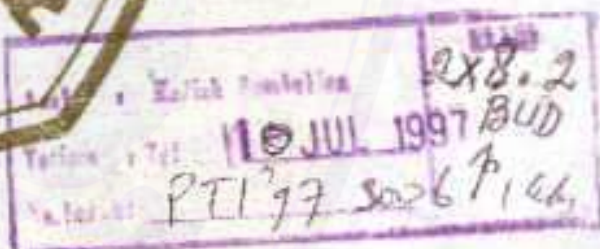
SKRIPSI



Oleh :

Dwi Drasetio Budi

NIM : 9002105203



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

JUNI 1997

MOTTO :

*"Sepala Pengetahuan Akan Mandul, Jika Tidak Mampu
Menggerakkan Manusia Untuk Berbuat Sesuatu Dengan
Mengamalkannya" (Desire Cardinal Maester).*



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahku *Nalrawi* dan Ibuku *Suryana* yang sangat kucintai dan kuhormati;
2. Kakakku, *Eko Wahyudi* dan *Sri Haryati*
3. *Guru-guruku* yang kuhormati;
4. *Sahabat-sahabatku* seruasib seperjuangan;
5. *Almamaferku* yang kujunjung tinggi



**PENGARUH SY'AH IMAMIYAH TERHADAP
KEBIJAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI
REPUBLIK ISLAM IRAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan tim penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Oleh :

N A M A : DWI PRASETIO BUDI
N I M : 9002105203
JURUSAN : PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM : PENDIDIKAN SEJARAH
ANGKATAN : 1990
DAERAH ASAL : SITUBONDO
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SITUBONDO, 12 SEPTEMBER 1971

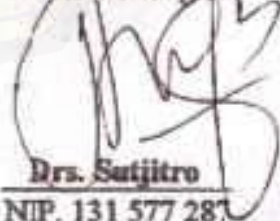
Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Imam Mochtar, SH.
NIP. 130 810 936

Pembimbing II



Dr. Sutjiro
NIP. 131 577 287

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan kuasanya sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Terelesaiakannya skripsi ini, merupakan suatu proses panjang dari suatu kerja keras yang membutuhkan ketekunan, ketelitian, ketahanan, dan kesabaran diri. Banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta dorongan agar tugas ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian skripsi ini. Rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam kepada :

1. Rektor Universitas Jember.
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
4. Ketua Program Pendidikan Sejarah
5. Pembimbing I dan Pembimbing II.
6. Dosen wali penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis hanya bisa memohon kepada Allah SWT, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang sepatutnya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca dan semoga Allah SWT berkenan memberikar petunjuk dan karunianya kepada kita semua, Amien.

Jember, 23 Juni 1997

Penulis

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji, dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai skripsi

Pada Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 1997
Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

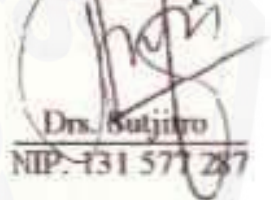
Tim Penguji :

Ketua



Dra. Sri Handayani
NIP. 131 472 786

Sekretaris



Drs. Sutjiro
NIP. 131 571 287

Anggota :

1. Drs. H. Choescnoel Hadi
NIP. 130 145 576

2. Drs. Soekemi
NIP. 130 341 207

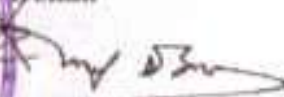
3. Drs. Imam Muchtar, S.H.
NIP. 130 810 936


.....

.....

.....

Mengesahkan
Dengan



Drs. Soelardjo BW
NIP. 130 287 101

RINGKASAN

Dwi Prasetyo Budi, Juni 1997, Pengaruh Syi'ah Imamiyah Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran.

Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Pembimbing (I) Drs. Imam Muchtar, S.H., (II) Drs. Sutjitro.

Kata Kunci : Pengaruh Syiah Imamiyah, Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran.

Keberadaan kaum mullah (ulama Syi'ah) sebagai penggerak revolusi Islam Iran dan mayoritas masyarakat Iran yang menganut mazhab Syi'ah Imamiyah merupakan dua faktor yang dominan kemenangannya dalam revolusi Iran. Keberhasilan revolusi Islam Iran menempatkan kaum mullah sebagai aktor dominan dalam setiap pembuatan kebijakan-kebijaksanaan dalam roda pemerintahan Republik Islam Iran, termasuk juga dalam kebijakan politik luar negerinya yang selalu berlandaskan pada ajaran Islam mazhab Syi'ah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah : bagaimanakah pengaruh Syi'ah imamiyah terhadap kebijakan politik luar negeri Republik Islam Iran?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas dan mendalam tentang latar belakang Syi'ah imamiyah mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Republik Islam Iran; dan ingin mendapatkan gambaran (deskripsi) yang jelas dan mendalam tentang pengaruh Syi'ah imamiyah terhadap kebijakan politik luar negeri Republik Islam Iran.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : (1) bagi penulis, merupakan pengalaman yang berharga sebagai latihan untuk berpikir secara kritis dan logis, serta dapat memperdalam pengetahuan dan pengembangan ilmu terutama dalam menguasai materi sejarah, khususnya sejarah Asia Barat Daya; (2) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memperdalam dan mengembangkan materi sejarah Asia Barat Daya, khususnya sejarah Iran, sebab penguasaan materi merupakan salah satu kompetensi seorang guru dalam mengajar; (3) bagi pembaca, dapat memperkaya pengetahuan dan menarik minat untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik Sejarah Asia Barat Daya yang tidak seluruhnya dapat diungkap dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juni 1996 sampai dengan bulan April 1997, dengan lama 11 (Sebelas Bulan), dengan menggunakan studi literatur, sehingga tempat penelitiannya adalah di perpustakaan. Purposive Sampling merupakan cara menentukan tempat penelitian, maka perpustakaan yang dipakai sebagai tempat penelitian adalah Perpustakaan Pusat Universitas Jember dan Laboratorium Program Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Usaha menentukan jawaban dari permasalahan diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumenter kemudian dianalisis dengan menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

Berdasarkan metode tersebut, maka hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan : latar belakang Syi'ah imamiyah mempengaruhi kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran adalah karena adanya revolusi Islam Iran tahun 1978-1979 yang didukung oleh mayoritas rakyat Iran yang menganut paham Syi'ah Imamiyah, maka akhirnya Syi'ah imamiyah dijadikan landasan idiol politik luar negeri Republik Islam Iran. Syi'ah sebagai ideologi politik bangsa berfungsi juga sebagai cara pandang bangsa Iran terhadap seluruh aspek kehidupan, baik sosio-politik maupun ekonomi. Dengan demikian dapat dipahami kenapa Syi'ah imamiyah berpengaruh terhadap kebijaksanaan politik luar negeri republik Islam Iran; pengaruh Syi'ah imamiyah terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran dapat terlihat pada masa kepemimpinan Ayatullah Khomeini dan masa kepemimpinan Rafsanjari I yang selalu mendukung setiap perjuangan kaum mustadh'afin (tertidas) melawan kaum mustakbirin (penindas) dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain yang sepaham dengan gerakan Syi'ah.

Saran yang dapat diberikan adalah: (1) untuk mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya lebih memperbanyak membaca buku-buku (literatur) yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sejarah, sehingga dapat memperluas cakrawala berpikir dan menambah perbendaharaan ilmu penegetahuan, sebagai bekal terjun ke masyarakat; (2) bagi pembaca, hendaknya lebih memahami arti penting ajaran agama yang diyakininya dengan tidak mencampur adukkan antara kepentingan agama dengan kepentingan pribadinya atau golongan tertentu, sehingga dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa dan menjaga stabilitas nasional; (3) bagi almamater, hendaknya selalu memberi motivasi kepada mahasiswa dan seluruh civitas akademika lainnya untuk selalu berpikir obyektif, rasional dan realistis dalam pelaksanaan penelitian sejarah sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian sejarah, serta lebih meningkatkan mutu pelayanan dan penyediaan buku-buku (literatur) sehingga kegiatan dapat terus dikembangkan, sebagai salah satu pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	3
1.3 Ruang Lingkup Dan Rumusan Permasalahan	6
1.3.1 Ruang Lingkup	6
1.3.2 Rumusan Permasalahan	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Latar Belakang Syi'ah Imamiyah Mempengaruhi Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran	8
2.2 Pengaruh Syi'ah Imamiyah Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran	14
2.3 Hipotesis	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pengertian Metode Penelitian	18
3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah	18
3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian	22
3.4 Metode Pengumpulan Data	22
3.5 Metode Analisis Data	23
3.5.1 Tehnik Logika Komparatif	24
3.5.2 Tehnik Logika Induktif	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Latar Belakang Syi'ah Imamiyah Mempengaruhi Kebijakan	
Politik Luar Negeri Republik Islam Iran	26
4.1.1 Revolusi Islam Iran Tahun 1978-1979	26
4.1.1.1 Latar Belakang Revolusi Islam Iran	27
4.1.1.2 Proses Revolusi Islam Iran	30
4.1.2 Ajaran - Ajaran Syi'ah Imamiyah	37
4.1.2.1 Imamah	37
4.1.2.2 Jilmd	41
4.1.2.3 Intidhar	44
4.1.3 Landasan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran	48
4.1.3.1 Landasan Idiil	48
4.1.3.2 Landasan Konstitusional	50
4.1.3.3 Landasan Operasional	
4.2 Pengaruh Syi'ah Imamiyah Terhadap Kebijakan Politik	
Luar Negeri Republik Islam Iran	53
4.2.1 Dimensi Syi'ah Imamiyah Dalam Sistem Pemerintahan Iran	53
4.2.1.1 Wilayah-e-Faqih (kepemimpinan Ulama)	55
4.2.2 Struktur Politik Republik Islam Iran	56
4.2.2.1 Kekuasaan Imam	58
4.2.2.2 Kekuasaan Legislatif	61
4.2.2.3 Kekuasaan Eksekutif	62
4.2.2.4 Kekuasaan Yudikatif	63
4.2.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran	64
4.2.2.1 Masa Kepemimpinan Imam Khomeini	65
4.2.2.2 Masa Kepemimpinan Rafsanjani I	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian	87
2. Peta Republik Islam Iran	88
3. Struktur kekuasaan Republik Islam Iran	89
4. Surat Keterangan Studi Literatur	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Pemasalahan

Revolusi Islam Iran telah menempatkan mazhab Syi'ah sebagai salah satu faktor yang dominan. Pertama, karena penggerak utama revolusi Iran adalah para tokoh agama (kaum Mullah) yang merupakan ulama Syi'ah; kedua, karena mayoritas penduduk Iran menganut mazhab Syi'ah khususnya Syi'ah imamiyah, sedangkan mengenai mazhab lain seperti mazhab sunni (Sunnah Wal Jama'ah) di Iran adalah golongan minoritas hanya sekitar 7% rakyat Iran yang menganut mazhab sunni.

Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang sekitar 90% rakyatnya menganut mazhab Syi'ah. Latar belakang historis menjadi salah satu penyebabnya, sekitar abad VII, putri seorang raja Persi Khosru Yazdajird menikah dengan salah seorang imam Syi'ah yaitu imam Husein bin Ali (anak imam Ali bin Abi Thalib) (M. Riza Sihbudi, 1989:41).

Pada abad X H/16 Masehi, Ismail seorang keturunan Syekh Shafiuddin Ardibili (wafat tahun 735 H/1334 M) seorang tokoh sufi dan juga seorang tokoh Syi'ah mengadakan pemberontakan di Ardibil bersama 300 orang Sufi yang menjadi murid leluhurnya, dengan tujuan mendirikan sebuah negara Syi'ah yang merdeka dan kuat. Untuk ini Ia mulai menaklukkan Persia dan menguasai pangeran-pangeran setempat. Setelah serangkaian pertempuran dengan penguasa-penguasa lokal dan juga orang-orang Utmani yang menyandang gelar Khalifah, Ismail berhasil sedikit demi sedikit menjadikan Persia sebuah negara dan menjadikan Syi'ah sebagai agama resmi kerajaannya. Setelah kematian Syah Ismail raja-raja golongan Safawid memerintah Persia hingga abad XII H/18 M. dan semuanya mengakui paham Syi'ah sebagai agama resmi negara dan lebih jauh mengokohkan pengaruhnya atas daerah itu (Thabataba'i, 1993:69-70).

Syi'ah sendiri merupakan salah satu mazhab didalam agama Islam, sebagaimana agama-agama lain, Islam terbagi dalam lima mazhab besar, yaitu Syi'ah, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Keempat mazhab yang terakhir sering disebut dengan mazhab-mazhab Sunni (sunnah Wal Jama'ah) yang dianut mayoritas umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Baik Syi'ah maupun Sunni

sama-sama mengakui prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (rukun Islam), seperti percaya bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Muhammad merupakan Nabi (rasul) dan Al Quran sebagai kitab sucinya.

Perbedaan utama antara Syi'ah dengan Sunni terletak pada masalah kepemimpinan (imamah), khususnya setelah Nabi Muhammad wafat. Syi'ah (yang berarti pengikut/partai) didefinisikan sebagai golongan muslimin yang menjadi pengikut Imam Ali bin Abi Thalib yang dipandang sebagai tokoh Islam kedua setelah Nabi Muhammad. Pengikut Syi'ah percaya bahwa masalah kepemimpinan (imamah) sudah ditentukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Sebagaimana para nabi, para imam ditunjuk oleh Tuhan. Bedanya bila para nabi ditunjuk atau diangkat langsung oleh Tuhan, maka para imam ditunjuk dan diangkat oleh nabi. Oleh karenanya percaya dan taat pada para imam merupakan salah satu kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Hal ini sebagai salah satu manifestasi tidak terpisahnya agama dan politik dalam ajaran Islam (Joesoef, Sou'yb, 1982:10-11).

Pentingnya masalah imamah merupakan salah satu bukti adanya hubungan antara aspek agama dan politik dalam pengertian kekuasaan dalam ajaran Syi'ah. Mazhab Syi'ah sendiri lahir karena faktor politis, yaitu menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan nabi sebagai pemimpin agama Islam (S. Husein M. Jafri, 1989:27).

Baik imamah maupun perwakilan imam digunakan untuk mengabsahkan kelompok-kelompok yang berkuasa. Pendekatan politis Islam merupakan bagian dari pendekatan religius terhadap masalah-masalah duniawi. Dalam hal ini, bertukar kedaulatan Tuhan di muka bumi ini hanya merupakan suatu upaya untuk merealisasikan yang spiritual dalam suatu organisasi manusia (Ahmad Moussawi, 1993:129-130).

Selain masalah imamah, masalah menentang suatu otoritas yang dianggap tidak adil, dan masalah kesediaan berkorban demi agama juga merupakan faktor-faktor penting dalam ajaran Syi'ah. Menentang suatu pemerintahan yang dianggap korup, penindas dan tiran merupakan kewajiban semua penganut Islam.

Ketiga ajaran, yaitu ketaatan kepada Imam, penentangan terhadap suatu otoritas dan kesediaan berkorban untuk syahid, telah menempatkan mazhab Syi'ah pada suatu peranan penting dalam revolusi Iran. Besarnya pengaruh Khomeini dan para Mullah, pentingnya fungsi mesjid sebagai tempat agitasi dan mobilisasi

massa, serta ketidak takutan rakyat terhadap tentara Syah selama pergolakan tahun 1978-1979, menunjukkan besarnya peranan ajaran Syi'ah tersebut dalam revolusi Iran dan masa-masa sesudahnya

Revolusi Iran, yang mengantarkan Khomeini dan kaum Mullah pada puncak kekuasaan merupakan hasil dari suatu proses akumulasi ketidak puasan rakyat terhadap rejim Syah. Keberhasilan revolusi tersebut, setidaknya-ditidaknya ditentukan oleh dua faktor yaitu pertama, berstunnya para penentang Syah Muhammad Reza Pahlevi, dan kedua, munculnya tokoh pemersatu yaitu Khomeini, sebagai akibat kuatnya pengaruh ajaran Syi'ah dikalangan masyarakat Iran (M. Riza Sihbudi, 1989:44-58).

Lebih lanjut menurut M. Riza Sihbudi, bahwa politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari kondisi dan situasi politik dalam negeri (domestic politics) negara yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan situasi politik dalam negeri, termasuk juga didalamnya mengenai tipe rejim yang berkuasa, ideologi yang dianut, kemampuan militer dan kemampuan ekonomi. Lingkungan internasional juga ikut mempengaruhi atau bahkan menentukan politik luar negeri suatu negara (1989:142).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul "Pengaruh Syi'ah Imamiyah Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran". Alasan penulis memilih permasalahan ini karena tertarik dengan pelaksanaan pemerintahan Republik Islam Iran sebagai suatu hasil dari revolusi yang digerakkan oleh para Imam Syi'ah. Ini tentunya juga sangat mempengaruhi terhadap kebijaksanaan politik luar negerinya yang merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian. Disamping itu sebagai pertimbangan lain mengenai penulisan ini adalah tersedianya sumber data yang cukup memadai, adanya kesediaan dosen pembimbing, topik tersebut belum pernah diteliti oleh mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Jember, khususnya program pendidikan Sejarah.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalah pahaman antara penulis dengan pembaca dalam menafsirkan tulisan ini, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan atau pengertian dari istilah-istilah yang

terkandung dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

a. Pengaruh

Arti kata pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang (anonim, 1990:664). Adapun pengertian pengaruh yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kekuatan atau kemampuan yang terkandung dalam konsep atau gerakan Islam Syi'ah Imamiyah yang mampu berpengaruh terhadap kebijaksanaan atau pelaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran.

b. Syi'ah Imamiyah

Pengertian Syi'ah secara harfiah berarti kelompok atau pengikut. kata tersebut dimaksudkan untuk menunjuk para pengikut Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin pertama Ahlul bait (Harun Nasution, 1992:904). sedangkan imamiyah berasal dari kata imam yang berarti gelar yang diberikan kepada seseorang yang memegang pimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, suatu ideologi politik, suatu aliran pemikiran keilmuan atau keagamaan (Thabathaba'i, 1993:119).

Berdasarkan pengertian di atas, maka Syi'ah Imamiyah adalah suatu kelompok atau kaum yang mengakui 12 imam sebagai pemimpinnya dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin pertama ahul bait yang mempunyai semangat kekuatan berdasarkan pengalaman para imam masa lampau yang mempengaruhi kehidupan konstitusional Republik Islam Iran termasuk dalam melaksanakan kebijaksanaan politik luar negerinya.

c. Kebijakan

Pengertian kebijakan (policy) menurut Hoogerwerf adalah sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut urutan waktu tertentu (1985:101). Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, mengartikan kebijakan (policy) sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu (1988:12). Pendapat lain merumuskan kebijaksanaan sebagai tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana yang

cocok dan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah (Bayu Suryaningrat, 1989:14).

Menurut Solichin Abdul Wahab yang mengutip pendapat dari beberapa ilmuwan politik seperti : Carl Friederich, mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan, kemudian dari pendapat James E. Anderson, kebijaksanaan dirumuskan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (1991:13).

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam usahanya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

d. Politik Luar Negeri

Politik menurut Jack C. Plano adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (1982:39). Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari suatu sistem politik dan melaksanakan tujuan-tujuannya (1981:8). Adapun luar negeri menurut Hasan Shadity adalah negeri luar, negeri asing (1984:2739).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, politik luar negeri yang dimaksud penulis adalah kebijakan atau siasat dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu negara Republik Islam Iran dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain yang dipengaruhi oleh ideologinya yaitu Syi'ah Imamiyah.

e. Republik Islam Iran

Republik Islam Iran adalah sebuah negara yang bentuk pemerintahannya berdasarkan ajaran Islam Syi'ah Imamiyah, terletak di Asia Barat Daya. Di sebelah utara berbatasan dengan Rusia dan Laut Kaspia, di sebelah timur berbatasan dengan Afganistan dan Pakistan, sebelah barat berbatasan dengan Turki dan Irak serta di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Persi dan Teluk Oman (Hasan Syadity, 1982:1480).

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud penulis dengan penelitian berjudul "Pengaruh Syi'ah Imamiyah Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran" adalah kekuatan atau kemampuan yang terkandung didalam suatu kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang merupakan

pemimpin pertama Ahlul Bait yang memegang kendali dalam suatu masyarakat perihal gerakan sosial, ideologi politik atau suatu aliran pemikiran/keagamaan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam suatu sistem politik yang berlaku di Republik Islam Iran dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lain di dunia internasional.

1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan

1.3.1 Ruang Lingkup

Agar dalam penelitian ini tidak terjerumus dalam sekian banyak data yang harus diteliti, maka dalam penelitian ini perlu diberi ruang lingkup, baik ruang lingkup tempat, ruang lingkup waktu maupun ruang lingkup masalah.

Adapun mengenai ruang lingkup tempat dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang akan dibahas, maka penulis akan membahas mengenai sebuah negara di Asia Barat Daya yakni Iran. Iran dalam hal ini adalah Iran setelah meletusnya revolusi tahun 1979 yang berubah namanya menjadi Republik Islam Iran.

Mengenai ruang lingkup waktu penulis membatasi penelitian ini dengan kurun waktu sejak berdirinya Republik Islam Iran sampai tahun 1993. Alasan penulis memilih pembatasan waktu tersebut, karena pada tahun 1979 yakni saat diproklamasikannya Republik Islam Iran, mulai saat itu juga terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam konstitusi yaitu masuknya pengaruh prinsip-prinsip Syi'ah yang begitu kuat dalam sistem pemerintahan Iran. Sedangkan tahun 1993 adalah masa berakhirnya kepemimpinan Hashemi Rafsanjani dalam periode pertama atau sebelum Rafsanjani diangkat sebagai presiden yang kedua kali.

Mengenai masalah maupun aspek-aspek yang penulis teliti adalah mengenai latar belakang Syi'ah imamiyah mempengaruhi kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran dan pengaruhnya terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran. Kaitannya dengan politik luar negerinya, maka penulis sedikit banyak menyinggung hubungan Iran dengan negara-negara lain yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok Islam Syi'ah.

1.3.2 Rumusan Permasalahan

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya (Winarno Surachmad, 1990:34). Masalah timbul karena adanya

kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan pemecahan. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimanakah pengaruh Syi'ah imamiyah terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan diatas, maka penulis dapat memaparkan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. ingin mengetahui secara jelas dan mendalam tentang latar belakang Syi'ah imamiyah mempengaruhi kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran.
2. ingin mendapatkan gambaran (deskripsi) yang jelas dan mendalam tentang pengaruh Syi'ah imamiyah terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat :

1. bagi penulis, merupakan pengalaman yang berharga sebagai latihan untuk berpikir secara kritis dan logis, serta dapat memperdalam pengetahuan dan pengembangan ilmu terutama dalam menguasai materi sejarah, khususnya sejarah Asia Barat Daya.
2. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memperdalam dan mengembangkan materi Asia Barat Daya Khususnya sejarah Iran, sebab penguasaan materi merupakan salah satu kompetensi seorang guru dalam mengajar.
3. bagi pembaca, dapat memperkaya pengetahuan dan menarik minat untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik Sejarah Asia Barat Daya yang tidak seluruhnya dapat diungkap dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Latar Belakang Syi'ah Imamiyah Mempengaruhi Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran

Agama dalam revolusi Islam Iran menjadi motor dari suksesnya revolusi menggulingkan kekuasaan Syah pada tahun 1979. Agama disini dapat diartikan sebagai pengakuan dari seorang muslim akan adanya suatu kekuasaan atau suatu prinsip tertinggi dimana nasibnya tergantung dan kepada siapa manusia itu harus menuruti ajaran-ajaran agama dengan penuh antusias. Disini sikap intelektual dan moral peneluk agama itu harus sesuai dengan ajaran agama yang diurut, cocok pula dengan model sosio-kemasyarakatan (Anonim, 1985:331).

Kaitan yang erat antara umat dengan ulama di satu pihak dan hubungan yang rapat antara berbagai wewenang di pihak lainnya, maka Syi'ah menjaikan tanggung jawab masyarakat untuk membawa persoalan-persoalan mereka kepada ulama untuk diselesaikan dan menjadikan ulama terlibat dalam persoalan-persoalan masyarakat. Integrasi ini lebih termanifestasikan dalam syi'ah dan digunakan secara terus menerus sebagai pendekatan bagi penyelesaian masalah dan hasilnya diserahkan langsung kepada masyarakat melalui peran ulama dan mesjid. Dengan demikian, peran Mujtahid berkaitan erat dengan berbagai masalah dan penderitaan rakyatnya menjadikan pemikiran Syi'ah relevan dan erat dengan kehidupan masyarakat (Ezzati, 1990:46).

Dalam pemerintahan Syah Mohamad Reza Pahlevi Peran ulama tersebut dikurangi, meskipun kondisi obyektif negara Iran waktu itu sangat jauh dari ajaran Islam Syi'ah. Ulama menjadi pasif dan semakin dikendalikan. Penciptaan sekolah-sekolah sekuler, kode-kode hukum yang berkiblat ke barat dan kontrol atas lembaga-lembaga Islam oleh pejabat-pejabat pemerintah telah membatasi kewenangan dan kekuasaan ulama. Digantikannya ulama oleh hakim-hakim, pegacara, pegawai negeri berpendidikan modern telah mengikis sumber pendapatan dan status mereka (Esposito, 1994:115).

Peran ulama Iran dalam hal ini diwakili oleh sosok Ayatullah Khomeini, berhasil mendobrak kebekuan Syi'ah di Iran dengan keberhasilannya dalam memberi tafsir baru pada ajaran Syi'ah yang pernah diselewengkan pada masa

Safawid. Dalam pandangan Khomeini, pada masa penantian (*intidhar*) tidak dibenarkan Islam Syi'ah berpangku tangan dalam masyarakat atau bangsa yang dieksploitasi oleh diktator politis aristokrasi yang ditunggangi oleh imperialisme (Anonim, 1985:346).

Peran dan kekuasaan politis kaum ulama (*mullah*) Iran merupakan hasil dari interpretasi langsung mereka sebagai pelindung agama. Interpretasi mereka dijiwai oleh dua faktor, figur Husein dan ketegasannya dalam melawan penindasan Yazid disatu pihak dan kekuasaan tertinggi hanyalah dipegang dan dipertanggung jawabkan kepada Imam yang ghaib di lain pihak oleh karena itulah tugas kaum *mullah* untuk menemukan suatu pemerintahan yang dianggap sempurna di masa ghaibnya (*okultasi*) imam (Siddiqui, dkk, 1984:34).

Pemikiran politik Khomeini, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan Islam adalah pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum-hukum Allah (*Al-Quran*). Secara otomatis Allah adalah satu-satunya pembuat undang-undang sedangkan manusia berperan sebagai pelaksananya. Namun demikian, Khomeini berkeinginan bahwa kepala pemerintahan sebagai pemimpin tertinggi haruslah seorang ahli hukum Islam (*faqih*) dan pelaksananya adalah pemerintah (Mortimer, 1984:310).

Mazhab Syi'ah yang dianut oleh mayoritas rakyat Iran secara tegas menganggap bahwa antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Manifestasi dari ajaran tersebut adalah dalam bentuk keterlibatan secara langsung kaum ulama dalam urusan politik. Tetapi kenyataannya, sejak Reza Pahlevi menjadi Syah (1941), peranan kaum ulama dalam politik mulai dihapuskan. Setelah terjadi percobaan kudeta yang dilakukan oleh Mossadeg tahun 1953, Syah secara tegas menghapuskan peranan kaum ulama yang juga mengubah sistem monarki konstitusional menjadi monarki absolut (M. Riza Sihbudi, 1989:26).

Sistem monarki absolut yang diterapkan Syah Iran, pada akhirnya menjadikan Syah bersikap otoriter dan diktator. Kediktatoran Syah dapat dilihat dalam segala kebijaksanaannya. Syah menganggap dirinya bukan sekedar kepala negara tetapi merupakan penguasa tertinggi atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Para menteri bawahannya tidak berani mengambil keputusan sendiri sebab semuanya telah diatur oleh Syah. Untuk segala kebijaksanaannya Syah tidak mau ditegur apalagi dikritik oleh bawahannya (M. Amien Rais, 1994:200).

Disamping tindakan Syah yang tidak memperhatikan kondisi rakyatnya, Syah juga berhasil melenaikan posisi parlemen, mengatur pelaksanaan pemilu dan merekrusa pembentukan partai politik. Akibatnya, baik parlemen maupun pemilu hanya berfungsi sebagai pelengkap demokrasi saja dan pembentukan partai politik itu hanya sekedar formalitas belaka (M. Riza Sihbudi, 1989:27).

Dalam bidang politik luar negeri, Syah Iran terlalu condong ke Amerika Serikat setelah sebelumnya menjalin hubungan yang erat dengan Inggris, ketergantungan Iran kepada Amerika Serikat ketika itu telah sampai pada tingkat dapat mendikte dan memaksa. Ditambah lagi oleh kondisi obyektif rakyat Iran pada masa Syah Mohammad Reza Pahlevi (1941-1979) hidup dalam jurang kemiskinan, terutama yang tinggal di pedesaan dan kota-kota kecil, juga oleh adanya bertagai bentuk intimidasi yang dilakukan oleh anggota SAVAK (Dinas Rahasia Iran) yang melakukan teror secara keji terhadap siapa saja yang dicurigai sebagai musuh negara (Musa Al-Musawi, 1988:15).

Strategi yang digunakan dalam mengejar GNP telah menimbulkan jurang yang semakin dalam antara golongan kaya dengan sebagai golongan minoritas dan golongan miskin sebagai mayoritas. Penghasilan yang diterima pemerintah dari hasil penjualan minyak tidak berhasil mengangkat rakyat Iran dari kemiskinan karena sebagian besar anggaran belanja diprioritaskan untuk membangun sektor industri dan Hankam (M. Riza Sihbudi, 1989:33).

Sementara sebagian besar rakyat Iran di bawah jurang kemiskinan, dilain pihak keluarga Syah dan pejabat-pejabat tinggi Iran terlena dengan hasil korupsi, yang ironisnya telah 50 tahun menjadi program pemerintah Iran guna menghapuskan korupsi itu (M. Amien Rais, 1994:200).

Terjadinya revolusi Islam Iran berbeda jauh dengan revolusi-revolusi yang pernah terjadi di dunia ini. Di Iran revolusi diciptakan oleh rakyat sebagai satu kesatuan rakyat umat. Sistem nilai yang berhasil mempersatukan rakyat keseluruhan sehingga mencapai situasi revolusioner adalah Islam Syi'ah, yang telah berada di Iran hampir selama 1400 tahun (Siddiqui, dkk, 1984:9).

Proses persatuan rakyat yang didukung oleh kondisi obyektif Iran pada masa pemerintahan Syah Mohammad Reza Pahlevi dan situasi umum di Iran merupakan suatu bentuk yang paradoksal (bertentangan) dengan kenyataan umum, bahkan sangat mencolok. Kadaan ini telah menimbulkan kekacauan di dalam negeri yang

memuncak pada terjadinya revolusi Iran tahun 1978-1979 (Musa Al-Musawi, 1988:14).

Melihat alasan rakyat dalam menentang rezim Syah, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan syah baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya yang bersifat otoriter serta pembatasan-pembatasan yang dikenakan syah kepada kaum mullah merupakan penyebab utama pecahnya revolusi. Proses deislamisasi yang diterapkan Syah Iran terhadap ajaran Islam Syi'ah yang dipegang teguh oleh rakyat Iran di bidang sosial-budaya dan keagamaan turut faktor penentu bangkitnya perlawanan terhadap rezim tiran syah (M. Riza Sihbudi, 1989:33)

Reaksi terhadap kebobrokan rezim syah selama memerintah negara Iran terwujud dalam gerakan-gerakan konsistensi (penentangan). Gerakan-gerakan penentangan tersebut sebagian besar dilakukan melalui masjid-masjid dan universitas-universitas. Disinilah para Ayatullah, HujjatullIslam para Mullah lainnya dengan gigih membeberkan sistem yang diterapkan Syah, ketergantungan pada Amerika Serikat, tindakan-tindakan teror yang dilakukan penguasa dan ketidakesuaiannya dengan ajaran-ajaran Islam Syi'ah sekte Imamiyah (Garwady, 1993:53)

Mengenai proses revolusi Islam Iran, sulit untuk menentukan kapan sebenarnya revolusi Islam itu dimulai. Namun yang jelas, pergolakan-pergolakan panjang yang pada akhirnya meruntuhkan kekuasaan dan pemerintahan Syah Mohammad Reza Pahlevi berawal dari terjadinya demonstrasi di kota suci Qum pada tanggal 9 Januari 1978. Sejak itu pihak oposisi melancarkan aksi-aksi yang semakin intensif. Pergolakan demonstrasi mewarnai kehidupan politik di Iran selama lebih dari satu tahun. Silih berganti kabinet bentukan Syah tidak mampu meredakan keadaan sehingga memaksa Syah untuk meninggalkan negaranya (M. Riza Sihbudi, 1989:34)

Menurut Musa al-Musawi, Syah mulai kelabakan dalam mengambil keputusan-keputusannya setelah rakyat Iran semakin terkoordinir melakukan berbagai macam aksi teror. Syah kemudian meminta Shahbour Bakhtiar untuk menyusun kabinet guna menggantikan kabinet Azhari yang telah mengundurkan diri dibawah tekanan luapan emosi rakyat Iran dan pemogokan-pemogokan yang berkepanjangan (1988: 22).



Setelah merestui pembentukan kabinet Shahbour Bakhtiar, syah segera meninggalkan negaranya ke luar negeri dengan alasan berobat. Kepergian syah ini semakin mempercepat berkobarnya api revolusi di Iran. Beberapa kejadian beruntun berikutnya telah berhasil meruntuhkan kekuasaan rezim Syah Mohammad Reza Pahlevi seperti yang diungkapkan oleh M. Riza Sihbudi:

"kepergian Syah ke luar negeri (11 Januari 1979), kembalinya Imam Khomeini ke Iran (1 Februari 1979) dan keluarnya sikap netral pihak angkatan bersenjata Iran (11 Februari 1979) dalam menghadapi konflik yang terjadi diantara pengikut Khomeini dan pada pendukung syah, merupakan tiga rangkaian kejadian yang mempercepat runtuhnya kekuasaan Syah Mohammad Reza Pahlevi yang kemudian menjurus pada kemenangan Republik Islam di bawah Ayatullah Khomeini" (1989:34).¹

Menurut ajaran Syi'ah terdapat ajaran-ajaran pokok yang menjadi landasan hidup setiap kaum syi'ah, yaitu Imamah, Jihad, dan Intidhar.

IMAMAH, ajaran ini merupakan ciri khas dari Syi'ah Imamiyah yang muncul sebagai protes dari dua masalah mendasar pada masa sesudah Nabi wafat. Kedua masalah tersebut adalah (1) Pemerintahan Islam, (2) Kewenangan dalam urusan pengetahuan keagamaan, yang keduanya merupakan hak istimewa dari Ahlul Bait (Thabathaba'i, 1993:88). Ini menunjukkan bahwa, Syi'ah merupakan golongan yang kuat, karena menumpahkan iman dan kepercayaannya kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya serta berkeyakinan bahwa manusia itu harus mempunyai imam dan menantikan seorang imam yang akan lahir diakhir zaman, membawa keadilan di dunia ini. Setiap pengikut Syi'ah diwajibkan mengakui kepemimpinan atau keimanan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya serta Mahdi yang akan lahir di-akhir zaman sebagai Imam terakhir. Barang siapa meninggalkan keyakinan tersebut dia bukanlah seorang Syi'ah, tetapi diklasifikasikan sebagai muslim biasa, keyakinan ini disebut Imamah (Abubakar Aceh, 1980:99-100).

JIHAD, menurut ajaran ini, menentang suatu otoritas yang dianggap tidak adil, kesediaan berkorban demi agama (syahid). Menentang suatu pemerintahan yang dianggap korup, penindas dan tiran adalah merupakan kewajiban semua umat Islam. Adapun kesediaan berkorban demi agama (syahid) berhubungan erat dengan konsep jihad (berjuang menegakkan ajaran Allah). Jihad dan syahid didasarkan atas keyakinan bahwa di dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman (M. Riza Sihbudi, 1989:44).

Perjuangan Imam Husain melawan Yazid bin Mu'awiyah merupakan simbol kepahlawanan, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu kaum Syi'ah menganggap bahwa menghidupkan kepahlawanan Imam Husain serta mengabdikan hidupnya untuk jihad sama dengan menghidupkan kebenaran, keadilan, kebajikan, pengorbanan diri, kemerdekaan keluarga dan sahabat-sahabatnya dari kezaliman Yazid dan pengikut-pengikut-nya (Abubakar Aceh, 1980:83).

INTIDHAR, ajaran ini merupakan salah satu faktor yang dominan dalam ajaran Syi'ah Imamiyah yaitu mengenai penantian imam yang ghaib. Dengan kepercayaan ini menjadi ciri khas tersendiri yang hanya dimiliki dan diyakini secara kuat oleh kaum Syi'ah (Donohue dan Esposito (Ed), 1989:554). Keyakinan Intidhar berarti mempercayai kembalinya zaman keemasan dalam revolusi yang akan menghasilkan pemerintahan yang damai dan adil di masa depan, bertentangan dengan konservatisme, klasisme dan tradisionalisme (Ezzati, 1990:94).

Prinsip penantian imam yang ghaib (intidhar) bagi Syi'ah adalah suatu prinsip sosio kultural dan sifat naluriah manusia. secara mendasar, kepercayaan kepada penyelamat yang dijanjikan di masa depan dan kepada prinsip penantian dengan sendirinya berorientasi ke depan (Ali Syar'ati, 1993:60).

Dimulainya prinsip Intidhar, secara otomatis penunjukan imam menjadi terhenti. Setelah itu mulailah masa taqlid, artinya mulai berlakunya suatu cara pemilihan khusus, yang menurut Syi'ah merupakan pemilihan pemimpin yang paling demokratis. Pemimpin yang dipilih dalam hal ini menjadi wakil Imam yang ghaib (naib al-imam) sekaligus bertanggung jawab kepadanya (Donohue dan Esposito (Ed), 1989:558).

Dalam sistem politik Republik Islam Iran, Mazhab Syi'ah tidak hanya menjadi agama yang dianut mayoritas rakyat negeri itu, tetapi juga berfungsi sebagai ideologi politik yang secara formal melandasi setiap kebijaksanaan pemerintah. Dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, antara lain tertulis bahwa salah satu asas sistem politik Republik Islam Iran adalah Imamah. Imamah merupakan salah satu prinsip utama ajaran mazhab Syi'ah. Begitu pula, kaum Syi'ah pada umumnya memiliki perhatian terhadap nasib kaum mustadh'afin (kaum tertindas). Mereka tidak mengenal pemisahan antara agama dan aspek sosio-politik (Salim Azzam, 1983:144).

Syi'ah sebagai salah satu mazhab yang dianut oleh sebagian besar rakyat Iran, bukan hanya sekedar dalam konteks ibadah, melainkan fenomena-fenomena yang ada pada masyarakat dunia. Peran agama (Islam Syi'ah) sebagai ideologi, yakni sebagai keyakinan yang dipilih secara sadar untuk memberikan respon pada kebutuhan dan masalah masyarakat yang terjadi. Agama sebagai ideologi bukanlah agama yang mempertahankan dan melegitimasi status quo, tetapi yang memberikan arah kepada bangsa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya (Ali Syari'ati, 1989:15).

Negara harus didasarkan bukan hanya pada konsep geografinya, ras, bahasa ataupun konsep-konsep materialistis lainnya, tetapi pada asas-asas dan cita-cita ideologi Islam. Kenyataan yang demikian menempatkan Syi'ah sebagai landasan idiil bagi politik luar negeri Republik Islam Iran (Riaz Hasan, 1985:47).

Politik luar negeri Republik Islam Iran mempunyai landasan idiil yaitu ideologi Syi'ah dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran antara lain menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional politik luar negeri Iran adalah kemenangan kaum Mustadzah'afin di dunia, serta kehancuran kaum Mustakbirin. Dalam pelaksanaannya politik luar negeri Republik Islam Iran didasarkan pada prinsip luar negeri "Laa Syarqiyyah, Laa Gharbiyyah, Jumhuriyyah Islamiyyah" (tidak Timur tidak Barat, melainkan Republik Islam) (Ramazani, 1990:55).

2.2 Pengaruh Syi'ah Imamiyah Terhadap Pelaksanaan Politik Luar negeri Republik Islam Iran

Setelah berhasilnya revolusi, tema pokok yang dominan bagi kaum muslimin Iran adalah membentuk pemerintahan selama Imam kedua belas belum muncul. Model negara Islam Iran jelas beraliran Syi'ah, ada konsep Wilayah-e-faqih, perwalian musyawarah hukum, yang merupakan penguasa tertinggi negara. Wilayah-e-faqih adalah pemimpin politik sekaligus pemimpin rohani.

Dalam kepercayaan Syi'ah, wilayah menunjukkan kesetiaan pada pemerintahan Imam dan mengakui hak imam untuk memerintah. Karena itulah, pada hakekatnya, teori wilayah-e-faqih dalam beberapa hal adalah kelanjutan dari

doktrin imamah, karena melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan imam (Ahmad Mussawi, dalam Mumtaz Ahmad, 1993:130).

Struktur politik Iran sebelum revolusi, yaitu pada masa kekuasaan Syah yang berdasarkan pada konstitusi 1906, kekuasaan eksekutif berada di tangan Syah dan menteri-menteri, pejabat-pejabat negara melaksanakan semua aturan perundangan yang berlaku atas nama Syah Iran (Mochtar Mas' oed dan Colin Mac Andrew, 1978:147).

Sedangkan sistem dan struktur politik Iran pasca revolusi disusun berdasarkan pada aspirasi rakyat yang disalurkan melalui pemilihan umum dan referendum, termasuk didalamnya pemilihan langsung presiden, anggota-anggota Majelis dan Majelis Ahli. Di samping dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, sebagai implimentasi kekuasaan rakyat, Iran juga menerapkan doktrin wilayat-e-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi di tangan seorang ulama (M. Riza Sihbudi, 1992:33).

Politik suatu negara pada dasarnya adalah tindak lanjut dari politik dalam negerinya. Dengan kata lain pembentukan kepentingan nasional adalah langkah pertama dalam merumuskan politik luar negeri. Dengan demikian politik luar negeri harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional suatu negara, dan kebijakan yang dihasilkan banyak dipengaruhi oleh pembuat kebijakan politik luar negeri tersebut (Dahlan Nasution, 1989:8).

Selama satu dekade Iran dibawah kepemimpinan Khomeini, politik luar negeri Iran sesakan-akan menampilkan wajah yang garang. Kegarangan itu sebenarnya lebih merupakan reaksi daripada aksi. Misalnya, perang dengan Irak yang berlangsung delapan tahun (22 september 1980 - 20 Agustus 1988), tidak akan terjadi seandainya Baghdad tidak membatalkan secara sepihak perjanjian Algir 1975, atau jika dunia internasional berusaha bersikap adil terhadap konflik Iran-Irak. Begitu pula pernyanderaan 50 orang diplomat Amerika Serikat di Teheran (November 1979 - Januari 1981) tidak akan terjadi jika Amerika Serikat tidak menerima mendiang bekas Shah Iran secara demonstratif. Ketegangan Iran dan Eropah Barat pun tidak perlu terjadi seandainya Eropah Barat tidak melancarkan pembelaan berlebih-lebihan pada Salman Rushdie (M. Riza Sihbudi, 1989:156).

Setelah kepemimpinan Khomeini, Iran dipimpin oleh "Dwi Tunggal" Ali Khamenei dan Rafsanjani yang dari visi politik lebih moderat, pragmatis, dan realists. Politik luar negeri Republik Islam Iran memang tidak akan segarang seperti pada era Khomeini. Ketua tokoh tersebut bahkan mengisyaratkan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Barat dan Timur. Iran tampaknya memang sedang berubah, setelah terlibat dalam perang selama delapan tahun dengan Irak dan berada dibawah rezim Islam garis keras Ayatullah Khomeini. Setelah itu Iran memasuki jaman baru. Perubahan itu antara lain, ditandai oleh adanya penggeseran orientasi dari revolusi ke pembangunan (M. Riza Sihbudi, 1991:220).

Hubungan Republik Islam Iran dengan negara lain terutama dengan negara yang di dalamnya terdapat golongan Syi'ah, selalu didasarkan pada kepentingan ekspor nilai-nilai revolusi Islamnya, misalnya hubungan antara Republik Islam Iran dengan Afganistan dan gerakan muslim di Asia Tengah, juga hubungannya dengan golongan Syi'ah di Arab Saudi (Anonim, 1991:203)

Kebijakan politik luar negeri Iran untuk mendukung kaum Mustadzah'afin (tertindas), terlihat dengan mendukung perlawanan kaum Mujahidin Afganistan serta mengecam campur tangan Rusia dalam pergolakan di Afganistan tersebut. Terjadinya konflik antara Armenia-Azerbaijan di Asia Tengah membuat hubungan Teheran-Moskow berada pada titik yang paling kritis, sebab Gorbachev secara terang-terangan menuduh Iran berada di balik konflik tersebut, sebaliknya para pemimpin Iran berulang kali melancarkan kecaman-kecaman keras terhadap intervensi Rusia terhadap Azerbaijan. Dukungan Iran terhadap Mujahidin Afganistan dan Azerbaijan ini semuanya berkaitan dengan dua tema paling penting dalam politik luar negeri Iran pasca revolusi yaitu, internasionalisme Islam dan permusuhan terhadap negara-negara super power yang dinilai sebagai kaum Mustakbirin (penindas) (Riza Sihbudi, 1991:205-213).

2.3 Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti sesuatu yang masih kurang dan thesis yang berarti sebuah kumpulan pendapat atau sebuah kesimpulan yang masih harus dibuktikan kebenarannya (Winarno Surachmad, 1990:58-69). Maksud dari perumusan hipotesis adalah untuk membuat langkah-langkah penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat

atan untuk menjelaskan suatu peristiwa, juga untuk membuat dugaan yang mendalam tentang suatu hal yang secara langsung ditunjang oleh bukti-bukti tertentu.

Adapun kegunaan hipotesis dalam penelitian dijelaskan oleh Koutjaraningrat, adalah sebagai berikut :

1. memberikan arah yang tegas bagi peneliti;
2. membantu dalam menentukan arah penelitian yang harus ditempuh;
3. menghindari penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan serta mengumpulkan data yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (1990:36-37).

Lebih lanjut Moh. Nasir mengemukakan pentingnya hipotesis sebagai berikut :

1. memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja peneliti;
2. menyiapkan peneliti pada kondisi fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian penelitian;
3. sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta menjadi kesatuan yang penting dan menyeluruh;
4. sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta (1988:183).

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari masalah penelitian yang ke-benarannya masih perlu dibuktikan melalui analisis terhadap fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan oleh seorang peneliti.

Berdasarkan dari penjelasan diatas serta perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Pengaruh Syi'ah imamiyah terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran sangat besar, ini dilatar belakangi oleh adanya revolusi Islam Iran 1978-1979 yang dipimpin oleh kaum mullah (ulama Syi'ah), akhirnya Syi'ah imamiyah dijadikan sebagai landasan idiil Politik luar negeri Republik Islam Iran dan berpengaruh terhadap kebijaksanaan politik luar negerinya pada masa kepemimpinan Imam Khomeini dan masa Rafsanjani I yang selalu mendukung perjuangan kaum Mustadh'afin (tertindas) melawan kaum Mustakbirin (penindas) dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain yang sepaham dengan gerakan Syi'ah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Pengertian metode adalah cara utama yang digunakan untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu (Winarno Surakhmad, 1990:131). Penelitian itu sendiri adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dimana usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1989:4). Moh. Ali memberikan pengertian tentang metode penelitian yaitu suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi atau untuk memperoleh suatu pengetahuan yang pada dasarnya adalah merupakan metode ilmiah (1985:21).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dengan cara mengembangkan fakta-fakta untuk menghasilkan atau hukum melalui metode ilmiah.

3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Pengertian metode penelitian sejarah menurut Moh. Ali ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau suatu masalah dari perspektif sejarah (1986:117). Louis Gottschalk mendefinisikan bahwa metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (1975:32). Sementara itu, Nugroho Notosusanto memberikan batasan pengertian metode sejarah sebagai suatu prosedur kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan masa lampau (1978:35). Hal senada dikemukakan oleh Louis Gootschalk, bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (1986:32).

Berdasarkan batasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian sejarah adalah suatu prosedur kerja sejarawan untuk menuliskan atau

merekonstruksi kisah masa lampau dengan berdasarkan jejak-jejak masa lampau yang ditinggalkan.

Adapun langkah-langkah metode sejarah menurut Nugroho Notosusanto yaitu: 1) heuristik; 2) kritik; 3) interpretasi; 4) historiografi (1971:17).

1. Heuristik

Kegiatan awal dalam penelitian sejarah adalah pengumpulan sumber-sumber atau bahan-bahan serta jejak-jejak masa lampau yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Aktifitas mengumpulkan sumber-sumber atau jejak-jejak sejarah disebut heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein* yang berarti *to find* yang mempunyai arti tidak hanya menemukan tetapi mencari dulu baru menemukan. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber (Nugroho Notosusanto, 1984:11).

Jadi dapat disimpulkan, heuristik adalah suatu proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah yang berupa jejak-jejak masa lampau. Sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) sumber benda (bangunan, senjata, perkakas); 2) sumber tertulis (dokumen); 3) sumber lisan (hasil wawancara) (Nugroho Notosusanto, 1971:18).

Sumber sejarah tertulis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. sumber primer adalah kesaksian seseorang yang melihat dengan mata dan kepala sendiri, sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan dan orang tersebut memperoleh sumber dari orang lain (Louis Gootschalk, 1986:35). Dengan demikian sumber primer mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, namun demikian bukan berarti sumber sekunder tidak lebih penting, keduanya sangat penting karena dapat saling melengkapi.

2. Kritik

Setelah sumber-sumber terkumpul, langkah selanjutnya adalah kegiatan mengkritik sumber-sumber yang ada. Menurut Nugroho Notosusanto, kritik adalah menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya (1971:17). Winarno Surachmad mengartikan kritik adalah tahap-tahap memilah dan mengkaji sumber-sumber yang telah diperoleh, apakah sumber tersebut benar-benar asli dan dapat dipercaya atau tidak (1991:35).

Pada langkah kritik, penulis dihadapkan dengan berbagai sumber, oleh karena itu sikap kritis, jujur dan berpegang teguh pada prinsip keilmuan sangat diperlukan. Pengertian kritik sumber dalam hal ini adalah menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak sejarah sebagai usaha untuk mendapatkan jejak-jejak atau sumber yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan atau autentik serta benar-benar mengandung informasi yang relevan untuk cerita sejarah yang disusun (Mohamad Ali, 1985:114). Langkah ini mempunyai maksud agar sumber yang digunakan untuk menyusun kisah sejarah itu adalah sumber yang orisinal (Moh. Nasir, 1985:59).

Kritik terhadap sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk meneliti kebenaran isi (data) sumber itu. Sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk menilai keaslian suatu sumber, yang dalam prakteknya dapat dilakukan dengan menjawab tiga pertanyaan pokok yang menyangkut sumber yang kita kehendaki, yaitu: 1) apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki; 2) apakah sumber itu asli atau turunan; 3) apakah sumber itu utuh atau telah dirubah (Wimarno Surachmad, 1990:135).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, kritik sumber adalah usaha untuk menilai, menguji atau menyelidiki sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar-benar dapat dipercaya untuk menyusun fakta-fakta sejarah.

3. Interpretasi

Langkah ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi atau penafsiran. Menurut Nugroho notosusanto, pada langkah ini menetapkan makna dan saling menghubungkan antara fakta-fakta yang telah dihimpun (1971:17). Hal senada juga dikatakan oleh I Gde Widja, bahwa fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan itu perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga antara satu fakta dengan fakta lain kelihatan suatu rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan kesesuaian satu sama lainnya (1988:23).

Jadi interpretasi dapat dimaksudkan sebagai aktifitas merangkaikan dan menghubungkan atau mengkaitkan fakta-fakta sejarah, dengan berusaha seobyektif mungkin sehingga dapat mengungkap kehidupan masyarakat masa lampau beserta segala aktifitas secara faktual, rasional, dan kronologis.

4. Historiografi

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah adalah penulisan sejarah atau penyajian (historiografi). Historiografi merupakan kegiatan merekonstruksi yang imajinatif dari keadaan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah. Dalam proses ini berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masa lampau (Louis Gootschalk, 1971:24).

Pada tahap ini persoalan kemahiran mengarang diperlukan oleh seorang sejarawan. Masalah bahasa tidaklah berbeda dengan masalah bahasa pada bidang-bidang lain yang mempergunakan bahasa, yakni memakai bahasa yang baik dan benar. historiografi adalah klimak dari penelitian sejarah, yaitu menuliskan hasil interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis menjadi suatu kisah yang selaras (Nugroho Notosusanto, 1971:24).

Metode yang penulis gunakan dalam langkah ini adalah metode diskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta sebagaimana adanya dengan penekanan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Hadari Nawawi, 1991:63). Metode diskriptif dalam pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang pengertian data itu, sehingga dapat terjadi penyelidikan diskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil bentuk studi komparatif (Winamo Surachmad, 1990:139). Adapun tujuannya menurut Moh. Nasir adalah untuk membuat diskriptif, gambaran atau lukisan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atas fenomena-fenomena yang diselidiki (1985:63).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa historiografi dengan menggunakan metode diskriptif adalah berusaha melukiskan peristiwa secara kronologis, logis dan sistematis dengan menerangkan fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta-fakta tersebut, sehingga dapat terwujud suatu kisah sejarah.

3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Bibliografis atau kepustakaan (library research). Kegiatan dari penelitian kepustakaan atau studi literatur ini adalah dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan tertulis lain (Hadari Nawawi, 1991:30). Muhammad Nasir berpendapat bahwa penelitian kepustakaan adalah menghimpun karya-karya tertentu dari seorang penulis dengan menerbitkan kembali dokumen-dokumen unik yang dianggap hilang atau tersembunyi seraya memberi interpretasi serta generalisasi yang tepat terhadap karya-karya tersebut (1985:62).

Mengingat banyaknya perpustakaan yang ada, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu menentukan tempat penelitian berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperoleh melalui informasi yang mendahului dan intensional hanya mengambil daerah kunci guna mencapai tujuan-tujuan tertentu (Sutrisno Hadi, 1986:62). Artinya penulis dengan sengaja menentukan daerah atau tempat penelitian dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dapat dipastikan bahwa buku-buku sumber yang diperlukan penulis dalam penelitian ini sudah tersedia.

Adapun perpustakaan yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian ialah : (1). Perpustakaan Pusat Universitas Jember (2). Laboratorium Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember. Disamping itu penulis juga menggunakan buku-buku koleksi pribadi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah metode dokumenter yaitu menggunakan sumber-sumber tertulis seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumenter (1985:131). Pendapat ini didukung oleh Hadari Nawawi yang mengatakan bahwa metode dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip yang termasuk juga

buku-buku tentang pendapat-pendapat, teori-teori dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (1991:133).

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian historis atau penelitian sejarah yang bersifat studi literatur. Oleh karena itu langkah awal dari penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang berupa buku-buku atau sumber tertulis lainnya. Sumber tertulis tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung oleh yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh dari orang lain orang yang tidak mengalami sendiri peristiwa yang dikisahkan itu (Louis Gottschalk, 1975:35 dan Nugroho Notosusanto, 1971:19).

Pada penelitian sejarah diusahakan agar dapatnya menggunakan sumber primer, sebab dengan menggunakan sumber primer diharapkan dapat diperoleh derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada menggunakan sumber sekunder. Namun menurut Winarno Surakned, sumber sekunder dapat dipakai hanya apabila sumber primer tidak dapat diperoleh (1990:134). Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber sekunder, hal ini dikarenakan sulitnya memperoleh sumber yang dapat dikategorikan sumber primer.

Adapun data yang diambil bersifat kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat dan uraian. Secara kualitatif buku-buku yang dipergunakan ada dua macam, yaitu buku pokok dan buku penunjang. Buku pokok adalah sumber yang paling banyak diambil dalam penelitian ini, sedangkan buku penunjang adalah sumber pelengkap yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dibahas berdasarkan sumber-sumber pokok.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah sumber data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya mengadakan penilaian atau menguji sumber data dengan kritik yang dilanjutkan dengan menginterpretasi yaitu mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh. Adapun tugas analisis data adalah mengumpulkan kembali, merangkaikan suatu fakta dengan fakta lain dengan hubungan yang logis, kronologis dan rasional, sehingga akan tersusun kisah sejarah yang obyektif dan rasional.

Pada penelitian sejarah langkah analisis data yang berkaitan dengan kritik dan interpretasi, menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif.

Adapun metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar dalam bentuk analisis yang berdasarkan pola berpikir induktif dengan memperhatikan hukum-hukum logika (Hadari Nawawi, 1991:62). Sedangkan logika adalah cabang dari filsafat yang mempelajari azas-azas dan aturan-aturan penalaran untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Sehingga dalam merekonstruksi kisah masa lampau didasarkan pada pemikiran yang teratur dan masuk akal. Ini sesuai dengan pendapat Sartono Kartodirdjo yang mengatakan, bahwa merangkai fakta-fakta sebagai cerita, harus digunakan pemikiran yang logis secara teratur menurut aturan yang tetap atau berdasarkan hubungan sebab akibat (1992:19). Berpikir yang dimaksud adalah kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang telah diterima melalui panca indera dan ditujukan untuk mencapai suatu kebenaran (W. Poesporodjo dan T. Gilarso, 1989:4).

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode filosofik adalah cara yang digunakan untuk memilih atau menyelidiki suatu masalah, yang berhubungan dengan langkah kritik dan interpretasi serta pembahasan melalui proses penalaran yang tepat sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang mendekati kebenaran dari suatu masalah yang sedang diselidiki.

3.5.1 Teknik Logika Komparatif

Pengertian teknik logika komparatif adalah upaya untuk mencari hubungan dari beberapa fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur yang sama dalam membedakan satu peristiwa (Winarno Surakhmad, 1990:136). Sedangkan teknik logika komparatif menurut Suharsimi Arikunto adalah suatu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya (1989:198). Hal ini diperjelas oleh Moh. Ali, bahwa teknik logika komparatif adalah cara membandingkan persamaan dan perbedaan berbagai fenomena (data) untuk mencari faktor apa atau situasi bagaimana yang menyebabkan suatu peristiwa (1986:123). Dengan demikian teknik logika

komparatif dapat disimpulkan adalah merupakan suatu cara untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya suatu peristiwa tertentu dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai fenomena atau pendapat yang timbul.

3.5.2 Teknik Logika Induktif

Pengertian teknik logika induktif adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan secara umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus (Moh. Ali, 1987:18). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi mendefinisikan induktif adalah suatu cara berpikir sintetik seseorang yang berdasarkan pada pengetahuan khusus, fakta-fakta yang khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum (1991:2).

Bertolak dari beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik logika induktif adalah cara menarik kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian diatas maka data-data sejarah yang telah diperoleh dan diuji dapat dirangkakan dan dihubungkan kembali dari fakta-fakta sebagai hasil dari langkah kritik dan interpretasi maupun penerapan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif yang kemudian disusun menjadi kisah sejarah yang sistematis, kronologis dan logis.



JEMBER

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari permasalahan pada bab terdahulu, maka hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. latar belakang Syi'ah Imamiyah mempengaruhi kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran adalah dikarenakan adanya revolusi Islam Iran tahun 1978-1979 yang didukung oleh mayoritas rakyat Iran yang menganut paham Syi'ah Imamiyah, maka akhirnya Syi'ah Imamiyah dijadikan sebagai landasan idil politik luar negeri Republik Islam Iran. Keberhasilan Revolusi Islam Iran yang digerakkan oleh kaum mullah (ulama Syi'ah) menempatkan Syi'ah ideologi politik bangsa, perannya sebagai ideologi, menempatkan Syi'ah berfungsi juga sebagai cara pandang bangsa Iran terhadap seluruh aspek kehidupan, baik sosio-politik maupun ekonomi. Dalam konteks yang demikianlah, dapat dipahami kenapa Syi'ah Imamiyah berpengaruh terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran.
2. pengaruh Syiah Imamiyah terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran sangat kuat sekali, ini dapat terlihat pada masa kepemimpinan Ayatullah Khomeini yang secara konsisten memegang tujuh prinsip kebijaksanaan politik luar negerinya, yaitu, 1) menolak segala bentuk dominasi; 2) mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah; 3) mempertahankan hak-hak umat Islam; 4) Non Blok; 5) berdamai dengan negara-negara yang tidak agresif; 6) menganggap kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan sebagai hak-hak universal; 7) menyokong setiap perjuangan kaum Mustadhafin (tertindas) tapi menahan diri dari segala bentuk intervensi. Dan masa kepemimpinan Rafsanjani I atau masa Rafsanjani sebelum diangkat sebagai presiden yang kedua kalinya, yang selalu mendukung setiap perjuangan kaum mustadh'afin (tertindas) melawan kaum mustakbirin (penindas) dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain yang sepaham dengan gerakan Syi'ah.

5.2 Saran

Dalam kesempatan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat baik kepada penulis pribadi maupun kepada pembaca umumnya, adapun saran tersebut ditujukan kepada :

1. mahasiswa Program Pendidikan Sejarah sebagai calon guru sejarah, hendaknya lebih memperbanyak membaca buku-buku (literatur) yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sejarah, agar dapat menguasai lebih mendalam, termasuk diantaranya sejarah Iran, sehingga dapat memperluas cakrawala berpikir dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, sebagai bekal nantinya apabila terjun di lapangan pendidikan.
2. pembaca, hendaknya lebih memahami arti penting ajaran agama yang diyakininya dengan tidak mencampur adukkan antara kepentingan agama dengan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, sehingga dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa dalam menjaga stabilitas bangsa.
3. almamater, hendaknya selalu memberi motivasi kepada mahasiswa maupun kepada seluruh civitas akademika lainnya untuk selalu bersikap obyektif, rasional dan realistis dalam pelaksanaan penelitian sejarah sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian sejarah, juga hendaknya almamater lebih meningkatkan mutu pelayanan dan penyediaan buku-buku (literatur) khususnya yang berhubungan dengan sejarah Asia Barat Daya agar penelitian ini dapat terus dikembangkan, sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abboushi, W.F., 1983, Politik di Iran, dalam Mochtar Mas' oed dan Collin Mac Andrew, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. (*)
- Abubakar Aceh, 1980, Syi'ah Rasionalisme dalam Islam, Ramadhan, Semarang.
- Al-Musawi, Musa, 1988, Tragedi Revolusi Islam Iran, terjemahan H.A Syakur Yasin, Al-Maarif, Bandung. (*)
- Anonim, 1985, Agama dan Tantangan Zaman, LP3ES, Jakarta.
- Baroa Pudjiantoro, 1979, Mengapa Pahlevi Tumbang. Khomeini Menang, Pelita Bahasa, Surabaya.
- Bayu Suryaningrat, 1989, Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Dahlan Nasution, 1989, Politik Internasional : Konsep dan Teori, Erlangga, Jakarta.
- Donohue, John J. dan Esposito, John L. (ed), 1989, Islam dan Tantangan Pembangunan : Ensiklopedi Masalah-masalah, terjemahan Machruun Husein, Rajawali Pers, Jakarta.
- Esposito, John L., 1994, Ancaman Islam : Mitos atau Realitas, terjemahan Afif Muhammad, Pustaka, Bandung.
- Ezzati, A., 1990, Gerakan Islam : Sebuah Analisis, terjemahan Agung Sulistyadi, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Garaudy, Roger, 1993, Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya, terjemahan Afif Muhammad, Pustaka, Bandung.
- Gootschalk, Louis, 1975, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notokusanto, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- Grolier International, Inc., 1990, Negara dan Bangsa Jilid 3, PT. Widya Dama, Jakarta.
- Hadarai Nawawi, 1991, Metode penelitian di Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harun Nasution, 1992, Ensiklopedia Islam Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Hasan Shadily, 1994, Emiklopedi Indonesia, Ihtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Hoogerwerf, 1985, Politikologi Pengertian dan Problem-Problemnya, Erlangga, Jakarta.
- I Gde Widja, 1988, Pengantar Ilmu sejarah : Sejarah dalam Perspektif Pendidikan, Satya Wacana, Semarang.

- Jalri, S. Husein M., 1989, Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah : dari Saqifah Sampai Imamah, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Joeoef, Souryb, 1982, Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-aliran Islam aekte Syi'ah, Pustaka Alhusna, Jakarta.
- Koetjaraningrat, 1990, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Khalizad, Zalmay, 1987, The Iranian Revolution and The Afghan Resistance, dalam Shi'isme Resistance and Revolution, Westview Press.
- Khomeini, 1983, Sebuah Pandangan Islam, dalam Salim Azzam (ed), Pemerintahan Islam, Mizan, Bandung.
- , 1987, Wilayahul Takwiniyah, Iran Press, Iran.
- Mahmud Junus, 1990, Terjemahan Al Quran Al-Karim, Al Ma-arif, Jakarta.
- M. Amien Rais, 1994, Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta, Mizan, Bandung.
- Miriam Budiardjo, 1988, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mochtar Mas' oed dan Collin Mac Andrew, 1978, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mohamad Ali, 1985, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Angkasa Bandung.
- Moh Nasir, 1988, Metode Penelitian, Rajawali Press, Jakarta.
- Moussawi, Ahmad, 1993, Teori Wilayah faqih : Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syi'ah, dalam Mumtaz Ahmad (Ed), Masalah-masalah Teori Politik Islam, Mizan, Bandung. (*)
- Mortimer, Edward, 1984, Islam dan Kekuasaan, terjemahan Erna Hadi dan Rahmani Astuti, Mizan, Bandung.
- M. Riza Sihbudi, 1988, Konflik Intern di Iran Pasca Revolusi, dalam Analisa No. 3, CSIS, Jakarta.
- , 1984, Diramika Revolusi Islam Iran : Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafat Ayatullah Khomeini, Pustaka Hidayah, Jakarta. (*)
- , 1991, Islam Dunia Arab, Iran : Bara Timur Tengah, Mizan, Bandung. (*)
- , 1992, Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washinton, Mizan, Bandung.
- , 1992, Politik Parlemen dan Oposisi di Iran Pasca Revolusi, dalam Jurnal Ilmu Politik 11, gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1993, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, PT. Eresco, Bandung.
- Nasir Tamara, 1980, Revolusi Iran, Sinar harapan, Jakarta. (*)

- Nugroho Notosusanto, 1971, Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah, Pusat Sejarah ABRI Dephankam, Jakarta.
- , 1984, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman), Idatu Press, Jakarta.
- Plano, Jack C., 1985, Kamus Analisa Politik, CV. Rajawali, Jakarta.
- Riaz Hasan, 1985, Islam dari Konservatisme Sampai Fundamentalisme, CV. Rajawali, Jakarta.
- Salah A. Nahdi, 1993, Jihad Fi Sabilillah Masa Kini, Arista Brahmadyasa, Jakarta.
- Salim Azzam, 1983, Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, Mizan, Bandung.
- Siddiqi, Kalim, dkk., 1984, Gerbang Kebangkitan Revolusi Islam dan Khomeini Dalam Perbincangan, penyunting Mustofa W. Hasyim, Shalahuddin Press, Bandung.
- Solichin Abdul Wahab, 1991, Analisis Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1985, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1989, Metodologi Research I, Andi Offset, Yogyakarta.
- Syari'ati, Ali, 1989, Ummah dan Inamah, terjemahan Afif Muhammad, Pustaka Hidayat, Jakarta.
- , 1992, Islam : Mazhab Pemikiran dan Aksi, terjemahan M.S. Nasrullah dan Afif Muhammad, Mizan, Bandung.
- Thabathaba'i, Allamah M.H., 1993, Islam Svi'ah : Asal Usul dan Perkembangannya, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. (*)
- W. Poespoprodjo dan T. Gilarso, 1989, Logika Menalar, Remaja Karya, Bandung.
- Yusuf Abdullah Puar, 1982, Perjuangan Ayatullah Khomeini, Sinar Harapan, Jakarta.
- , tth, Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, Humas Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jakarta. (*)
- , tth, 1989-1990, Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Jakarta.
- , tth, 1990-1991, Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Jakarta.

(*) sumber pokok



Matrik Penelitian

Lampiran 1

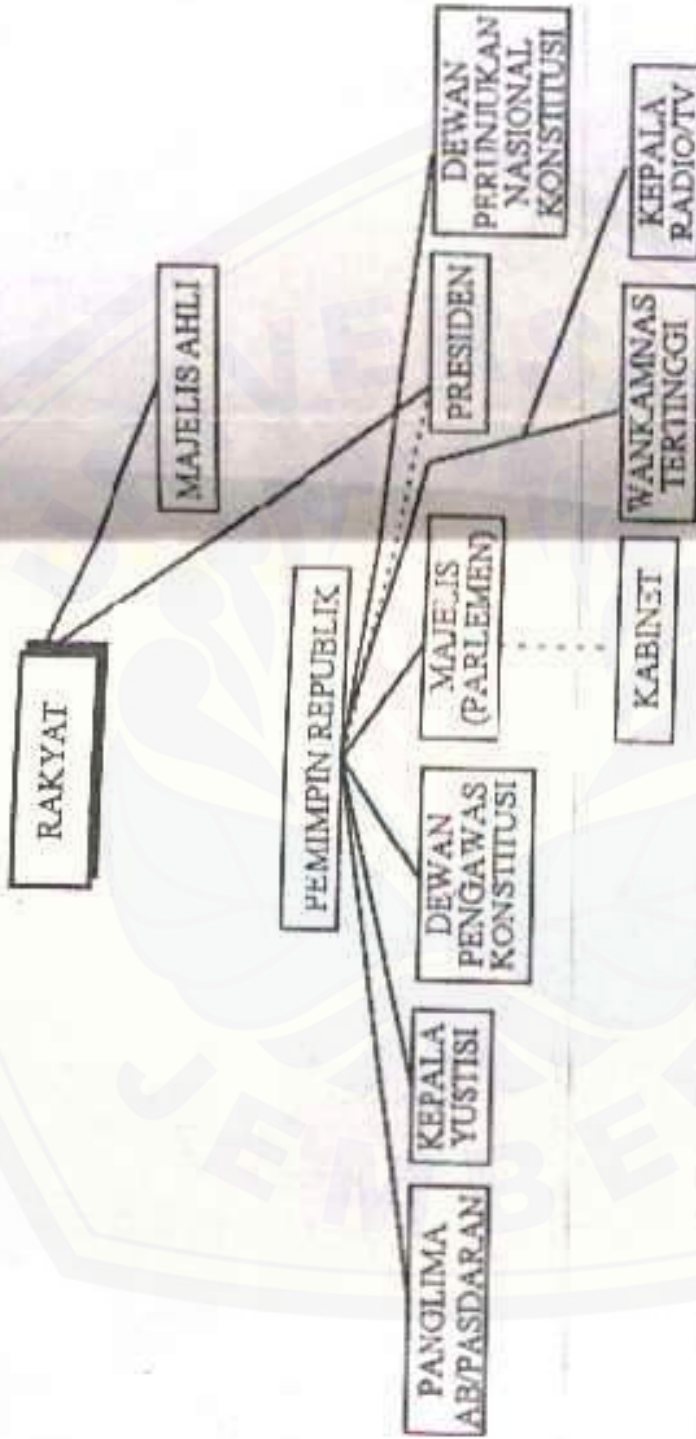
TOPIK	JUDUL	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	MASALAH PENELITIAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS
SEJARAH POLITIK IRAN	PENGARUH SYT'AH IMAMIYAH TERHADAP KEBIJAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK ISLAM IRAN	Jenis : Penelitian Historik Sifat : Penelitian Kepustakaan/ Bibliografis	Bagaimanakah pengaruh Syt'ah imamiyah terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran ?	Buku-buku : 1. Buku pokok : 8 buah 2. Buku penunjang : 49 buah	1. Penentuan tempat penelitian 2. Purposive sampling 3. Pengumpulan data : Dokumenter 4. Analisis Data : Filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif	Pengaruh Syt'ah imamiyah terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Republik Islam Iran sangat besar, ini dilatar belakangi oleh adanya revolusi Islam Iran 1978-1979 yang dipimpin oleh kaum mullah (ulama Syt'ah), akhirnya Syt'ah imamiyah dijadikan sebagai landasan idil politik luar negeri Republik Islam Iran dan berpengaruh terhadap kebijaksanaan politik luar negerinya pada masa kepeimpinan Imam Khomeini dan masa Rakanjani I yang selalu mendukung perjuangan kaum Mustadh'afin (tertindas) melawan kaum Murtakibin (perindas) dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain yang sepulau dengan gerakan Syt'ah.

PETA NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN



Sumber : Grolier International Inc, 1990:61

STRUKTUR KEKUASAAN REPUBLIK ISLAM IRAN



CATATAN :

—: Memilih Langsung

.....: Menyetujui Langsung

SUMBER

Laporan Tahunan Kedutaan

Besar Ri - Teheran 1990 - 1991

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
UPT PERPUSTAKAAN**

Surat Keterangan Studi Literatur

Nomor : 116/PT 32 Hib/San '97 -

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : DWI PRASETIO BUDI

NIM : 9002105203

Mahasiswa : Prog. Pendid. Sejarah, FKIP UNIVERSITAS JEMBER

Angkatan : 1990

Terhitung mulai bulan April 1996 sampai Maret 1997 telah mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal	Tempat			
	R. Sirkulasi	R. Referensi	R. OR	R. Skripsi
20 April 1996	x	-	-	-
28 April 1996	-	-	x	x
3 Mei 1996	-	x	-	-
13 Juni 1996	x	-	-	x
28 Agustus 1996	-	x	x	x
8 Agustus 1996	x	-	-	x
30 September 1996	-	x	-	-
1 Oktober 1996	x	-	x	-
15 Nopember 1996	-	-	x	-
27 Desember 1996	x	-	-	-
20 Januari 1997	-	x	-	-
10 Maret 1997	x	-	-	x

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya

Jember, April 1997

An. Kepala

UPT Perpustakaan



W. Budiwati S. Sos

Nip. 130 683 181